
COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MELESTARIKAN BUDAYA NYAWANG BULAN DI KASEPUHAN BUNISARI DESA GIRIMEKAR

Jamaludin Anshory¹, Siti Alia²

¹*Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, jamalanshory@gmail.com*

²*Administrasi Publik, UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia, sitalia@uinsgd.ac.id*

Abstrak

Melestarikan budaya merupakan suatu langkah dari kolaborasi antara pemerintah dan juga masyarakat untuk memajukan suatu wilayah. Dalam konteks collaborative governance, penelitian ini mengkaji tentang penerapan collaborative governance dalam melestarikan budaya yang ada di kasepuhan bunisari yaitu nyawang bulan. Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini meninjau dan mengeksplorasi peran dari para pemangku kebijakan, termasuk pemerintah lokal dan komunitas adat yang ada di wilayah tersebut. Dalam menjaga dan mempromosikan budaya tradisional ini. Temuan menunjukkan bahwa kolaborasi yang efektif di antara pihak-pihak tersebut telah menghasilkan sinergi positif yang mendukung keberlanjutan budaya Nyawang Bulan. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses kolaborasi, seperti perbedaan kepentingan dan sumber daya yang terbatas, serta menawarkan rekomendasi untuk meningkatkan kerjasama antar pemangku kepentingan. Hasil penelitian ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya yang lebih inklusif dan berkelanjutan di wilayah-wilayah adat lainnya.

Kata Kunci: *Collaborative Governance, Pelestarian Budaya, Nyawang Bulan, Kasepuhan Bunisari, Desa Girimekar*

Latar Belakang

Budaya Nyawang Bulan merupakan salah satu budaya warisan yang ada di Kasepuhan Bunisari Desa Giri Mekar yang dinilai masih memiliki nilai historis dan spiritual yang tinggi oleh masyarakat setempat. Tradisi ini tidak hanya menjadi simbol dan identitas kultural saja akan tetapi berfungsi sebagai penghubung dan penguat ikatan sosial dengan solidaritas komunitas, seiring berjalannya waktu dan perubahan zaman di era modernisasi tentu keberlanjutan budaya ini akan menghadapi berbagai tantangan dan problematika baik itu perubahan demografis, urbanisasi dan pergeseran nilai-nilai sosial yang telah mengancam eksistensi dari adanya tradisi nyawang bulan.

Nyawang Bulan merupakan salah satu budaya dan tradisi masyarakat Kasepuhan Bunisari yang sampai sekarang masih rutin diselenggarakan oleh desa girimekar setiap tanggal 14 Hijriyah. Walaupun dalam hal ini pemerintah desa kurang berperan terhadap proses penyelenggaraannya namun selalu hadir sebagai tamu undangan. Adapun rangkaian acara yang senantiasa disajikan dalam acara nyawang bulan diantaranya pantun petuduh pitutur sesepuh Sunda, pertunjukan budaya lokal, pasar jajanan tradisional yang hanya bisa dibeli menggunakan koin lokal kasepuhan bunisari. Adapun tradisinya nyawang bulan ini sudah pernah berkolaborasi dengan LA2KP Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang bekerja sama dengan dinas pariwisata dan budaya, selain itu juga kegiatannya uang bulan di kasepuhan bunisari juga pernah berkolaborasi dengan tokoh Sunda yaitu bapak Dedi atau yang sering disapa dengan kang Dedi Mulyadi. Ada hal unik yang ditemukan dalam kegiatan nyawang bulan di kasepuhan bunisari yaitu bagi para wisatawan atau pengunjung yang ingin berbelanja atau membeli makanan diwajibkan untuk menukarkan uangnya terlebih dahulu dengan koin yang telah disediakan oleh pihak kasepuhan bunisari. Di mana satu koin lokal kasepuhan bunisari itu dihargai dengan Rp 2.500.

kemudian keunikan lainnya yaitu setiap pengunjung yang datang dalam acara nyawang bulan tidak diperbolehkan untuk membawa plastik ataupun wadah makanan yang berbahan plastik, hal ini sudah dicantumkan dalam standar operasional prosedur nyawang bulan yang bisa di scan ketika membeli koin.

Jika berbicara konteks pelestarian budaya, konsep *collaborative governance* memiliki nilai plus dan juga relevan karena mengacu pada proses pengambilan keputusan dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan baik itu pemerintah, komunitas lokal dan juga organisasi non pemerintah. Hal ini dilakukan tiada lain bertujuan untuk mencapai solusi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih dalam tentang bagaimana *collaborative governance* dapat diterapkan dan direalisasikan dalam upaya melestarikan Budaya Nyawang Bulan. Melalui pendekatan kualitatif penelitian ini mengidentifikasi lebih dalam tentang kontribusi dan juga peran dari para pemangku kepentingan dengan harapan penelitian ini dapat menjadi jawaban dan memberikan wawasan yang berharga bagi pengembangan strategi pelestarian budaya yang lebih efektif dan berkelanjutan.

Penelitian ini diharapkan dapat menjawab persoalan-persoalan yang dinilai penting, seperti bagaimana pemangku kebijakan berkolaborasi dalam melestarikan Budaya Nyawang Bulan? Apa saja tantangan utama yang dihadapi dalam proses kolaborasi? dan bagaimana strategi pemerintah dan komunitas lokal dalam berkolaborasi untuk mengoptimalkan dan memastikan keberlanjutan tradisi Nyawang Bulan?

Tinjauan Pustaka

Collaborative Governance

Collaborative Governance merupakan suatu pendekatan antara pemerintah yang bekerjasama dengan berbagai pihak pemangku kepentingan baik itu masyarakat sipil, organisasi non pemerintah ataupun sektor swasta untuk melaksanakan suatu kebijakan dan program. Istilah *Collaborative Governance* merupakan suatu cara dari pengelolaan pemerintah yang melibatkan pihak pemangku kepentingan keluar pemerintahan yang berorientasi pada musyawarah dalam pengambilan keputusan yang tujuannya tiada lain untuk melaksanakan atau membuat suatu kebijakan publik serta program-program publik (Retno sunu astuti, 2020).

Berdasarkan argumen di atas, peneliti meninjau bahwasanya proses kolaborasi itu dilakukan oleh para pemangku kepentingan, yang di mana pemangku kepentingan di sini adalah pemerintah desa girimekar dan juga dinas pariwisata dalam mengglobalisasikan dan mengudarkan tradisi nyawang bulan ke masyarakat umum. Karena setelah meninjau ke kasepuhan bunisari ternyata peran pemerintah ini dinilai sangat minim bahkan jarang muncul di saat agenda nyawang bulan, yang berperan aktif di sini hanya masyarakat lokal yang notabene asli dari kasepuhan bunisari.

Hal ini ditunjukkan berdasarkan pada salah satu teori yang dibawakan oleh (C. Ansell, 2007). yang mengatakan bahwa *Collaborative Governance* dalam artian sempit termasuk dalam kelompok aktor dan fungsi, yang digarisbawahi dengan kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Dapat disimpulkan bahwa faktor dan fungsi mencakup kepada peran, sedangkan peran pemerintah yaitu untuk melestarikan budaya nyawang bulan, yang kalo dalam Bahasa sunda itu dikenal dengan istilah "*ngamumule budaya*".

Pelestarian Budaya

Koentjaraningrat dalam (Triwardani, 2014) mendefinisikan pelestarian budaya sebagai sebuah sistem yang melibatkan masyarakat masuk ke dalam subsistem kemasyarakatan serta mempunyai komponen yang saling terhubung dan keterkaitan antar sesama, karena pelestarian

budaya bukanlah suatu kegiatan yang dapat dilakukan secara individu akan tetapi menjadi tugas masyarakat lokal yang mempunyai tekad dalam melestarikan budaya tersebut.

Kemudian (Koendjaraningrat, 2015) mendefinisikan kebudayaan dengan seluruh gagasan dan karya yang dibuat oleh manusia dan harus dibiasakan dengan belajar, serta keseluruhan hasil dari karya yang telah dibuatnya. Dari pemahaman di atas dapat didefinisikan bahwa budaya itu merupakan seluruh karya manusia yang harus dibiasakan agar bisa menikmati hasil dari karyanya tersebut.

Ada beberapa cara untuk melestarikan budaya, antara lain: (a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam memajukan budaya lokal; (b) Mendorong masyarakat untuk memaksimalkan potensi budaya lokal beserta pemberdayaan dan pelestariannya; (c) Berusaha menghidupkan kembali semangat toleransi, kekeluargaan, keramahan dan solidaritas yang tinggi; dan (d) Selalu mempertahankan budaya Indonesia agar tidak punah. Mengusahakan agar masyarakat mampu mengelola keanekaragaman budaya lokal (Yunus. Rasid, 2014).

Peran Pemerintah dalam Pelestarian Budaya

Peran merupakan aspek dinamis yang mempunyai status atau kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan sesuai maka ia telah menjalankan suatu peranan (Soekanto., 2002). Sedangkan (Gibson, 2002) mengatakan bahwa peran merupakan seseorang yang harus berhubungan dengan dua sistem yang berbeda yang mana sistem ini biasanya berbentuk suatu organisasi.

Dari kedua definisi diatas dapat disimpulkan bahwa peran merupakan seseorang yang mempunyai kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik berdasarkan suatu organisasi. Dalam lingkup nasional, masih banyak sekali hambatan mengenai peran pemerintah dalam memajukan desa wisata yang mempunyai ciri khas budaya. Hal ini dapat dilihat dalam setiap agenda dan juga rencana pembangunan pemerintah yang dinilai sangat sulit dalam mengalokasikan dana untuk melestarikan budaya, padahal dengan adanya pembelajaran budaya masyarakat juga dapat mengetahui betapa pentingnya budaya lokal dalam membangun budaya nasional serta cara mengimplementasikannya di tengah-tengah perkembangan zaman yang serba digital (Sedyawati, 2006).

Metode

Pada penelitian ini, berdasarkan pada latar belakang mengenai pencegahan pemerintah terhadap pernikahan dini yang dibatasi waktu oleh peneliti, maka dari itu peneliti menggunakan pendekatan induktif dengan metode kualitatif. Menurut (Creswell, 2021), menyatakan bahwa penelitian kualitatif merupakan metode untuk memahami dan mengeksplorasi berbagai makna yang diyakini berasal dari adanya sebuah permasalahan kemanusiaan atau masalah sosial. Metode ini juga menganalisis data dengan cara induktif mulai dari sebuah tema yang khusus kepada sebuah tema yang umum, serta menerjemahkan makna dari seluruh data yang didapat

Kemudian sumber data yang didapatkan oleh peneliti yaitu mengadakan observasi dan wawancara secara langsung ke kasepuhan bunisari. Menurut (Creswell, 2021) mengatakan bahwa observasi merupakan suatu kegiatan ketika peneliti terjun langsung ke lokasi untuk mengamati aktivitas dan perilaku setiap individu yang berada di lokasi penelitian. Pada kegiatan ini, peneliti mencatat atau merekam seluruh kegiatan yang terjadi di lokasi penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Kolaborasi Pemangku Kepentingan dalam Pelestarian Nyawang Bulan

Kolaborasi menurut (Lai, 2011) didefinisikan dengan hubungan antarorganisasi atau antarperorangan yang saling berpartisipasi dan saling menyetujui untuk bersama mencapai tujuan, berbagi informasi, berbagi sumberdaya, berbagi manfaat, dan bertanggungjawab dalam pengambilan keputusan bersama untuk menyelesaikan berbagai masalah. Berdasarkan dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa kolaborasi merupakan suatu hubungan antar organisasi yang saling berpartisipasi untuk merealisasikan capaian bersama.

Namun perlu diketahui bahwasanya di Desa Girimekar khususnya Kasepuhan Bunisari masih minim sekali kolaborasi antar pemangku kepentingan baik itu pihak desa dengan dinas pariwisata dan kebudayaan ataupun pihak desa dengan kampung yang mempunyai budaya nyawang bulan yaitu kasepuhan bunisari. Mengenai hal ini peneliti mewawancarai pak pipih selaku tokoh yang merintiskan adanya budaya atau tradisi Nyawang Bulan. Beliau mengatakan bahwa aparat desa itu kurang memperhatikan karena tradisi nyawang bulan karena bisa dilihat dari lokasi nyawang bulan pun itu merupakan tanah pribadi dari Pak Pipih selaku perintis, namun beliau mengatakan bahwasanya kegiatan Nyawang Bulan ini tidak akan terealisasi jika masyarakat tidak ikut meramaikan. Karena masyarakat di sana dapat dirangkul dengan baik oleh Pak Pipih sehingga agenda Nyawang Bulan pun masih terus berjalan sampai sekarang walaupun kurang dukungan dari pemerintah.

Collaborative Governance dalam Melestarikan Budaya Nyawang Bulan

Terdapat lima prinsip yang diterapkan dalam kegiatan kolaborasi pelestarian Budaya Nyawang Bulan di Kasepuhan Bunisari Desa Girimekar. *Pertama*, Partisipasi dari para pemangku kebijakan dan juga masyarakat sangat dibutuhkan, karena masih ada kekurangan dalam hal partisipasi baik itu dari masyarakat ataupun pemerintah. Dalam ranah pemerintah, mereka kurang memberikan dukungan dan partisipasi untuk terealisasinya budaya Nyawang Bulan. Kemudian dari masyarakat juga peran pemuda Kasepuhan Bunisari masih dinilai sangat minim. Karena ketika Kasepuhan Bunisari mengundang kang Dedi Mulyadi, ada seorang pemuda yang bercerita dan mengatakan bahwa peran pemuda di Kasepuhan Bunisari ini tidak kelihatan sama sekali khususnya dalam melatih anak-anak untuk penampilan di kegiatan Nyawang Bulan. Beliau juga mengatakan kalau melatih anak-anak itu sendirian dan di tempat yang terbatas karena tidak adanya partisipasi dan dukungan dari rekan-rekan seumurannya. *Kedua*, Akseptasi atau penjaminan tanda bukti ketika melakukan kerjasama juga sebelumnya belum dilakukan. Akan tetapi hal ini sudah terealisasi oleh pihak LA2KP Administrasi Publik UIN Sunan Gunung Djati Bandung yang mengadakan kerjasama dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan untuk mendapatkan perhatian lebih terhadap budaya nyong bulan yang ada di Kasepuhan Bunisari.

Ketiga, Komunikasi antar pemangku kepentingan juga sangat dibutuhkan dan sangat penting bagi masyarakat, karena masih banyak sekali masyarakat yang awam terhadap tradisi ini dan pemerintah setempat pun belum menemukan solusi mengenai hal ini. Ini dapat terjadi karena pemerintah setempat menginformasikan kegiatan nyawang bulan lewat media sosial, akan tetapi masyarakat di sana dinilai masih minim dalam pemanfaatan teknologi sehingga kurang mendapatkan informasi. *Keempat*, Berbagi (*Share*), dalam konteks berbagi, seharusnya pemerintah desa dan masyarakat setempat harus bisa melihat terhadap apa yang dilakukan oleh kang Dedi Mulyadi, di mana beliau duduk berkumpul dan berdiskusi bersama para ketua RT dan RW yang ada di Desa Girimekar sehingga dapat menemukan akar permasalahan dan mencari solusi secara bersama-sama.

Rekomendasi Memperluas Kolaborasi

Melestarikan budaya Nyawang bulan juga tentu memerlukan pendekatan yang komprehensif dan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Beberapa rekomendasi untuk memperluas partisipasi masyarakat dalam melestarikan budaya Nyawang Bulan *Pertama*, Sosialisasi, di era yang serba digital ini seharusnya penyelenggara dan juga pemerintah setempat harus bersama-sama dalam mensosialisasikan agenda Nyawang Bulan. Media sosial dalam bentuk kampanye digital seharusnya dibuat semenarik mungkin agar bisa mempromosikan ke masyarakat luar. Sosialisasi ini sangat penting dilakukan baik itu secara media *online* ataupun melalui RT atau RW yang ada di desa girimekar agar mereka bisa mensosialisasikannya ke masyarakat. *Kedua*, Kegiatan Komunitas, ini sebenarnya sudah ada yaitu komunitas tarian budaya tradisional yang diprakarsai oleh Mojang Jajaka Desa Girimekar, namun masih ada problem yang didapatkan. Baik itu dari segi fasilitas tempat ataupun peran para pemuda atau karang taruna kampung Kasepuhan Bunisari. Walaupun sudah pernah mengadakan kolaborasi antar komunitas lokal yang masih melestarikan budaya budaya lokal seperti angklung, jaipong, dan lain sebagainya.

Ketiga, Infrastruktur dan Fasilitas untuk tempat Nyawang Bulan sendiri dinilai sudah cukup memadai dari segi fasilitas pun dinilai komplit, mulai dari *spot* foto, mushola, jajanan, tempat makan, dan lain sebagainya. Mungkin apabila ke depannya ingin lebih meng globalkan kasepuhan bunisari, maka harus disediakan juga tempat parkir yang cukup luas. *Keempat*, Dukungan Pemerintah dan Swasta dengan pendanaan dan sponsorship dalam hal ini tentu sangat dibutuhkan. Ketika mewawancarai Pak Pipih dan Pak Guru selaku pengelola Kasepuhan Bunisari, mereka mengatakan bahwasannya tidak ada pemasukan dana sama sekali untuk acara ini. Karena memang acara nyawang bulan itu keinginan dari masyarakat maka masyarakat juga yang harus gotong royong untuk merealisasikannya. *Kelima*, Penghargaan dan Apresiasi kepada masyarakat yang tampil ke depan perlu dipertimbangkan, karena selama ini mereka tampil tanpa dibayar atau dikasih imbalan selain dari *saweran* Pak Guru berharap ada donatur atau Kerjasama dengan pihak pemerintah untuk memberikan apresiasi dengan uang akomodasi bagi siapa saja yang berani tampil agar masyarakat juga tertarik untuk mengikuti dan menikmati rangkaian acara nyawang bulan.

Kesimpulan

Kesimpulan secara umum dari artikel ini adalah bahwa pelestarian budaya nyawang bulan di Kasepuhan Bunisari, Desa Girimekar, dapat dilakukan secara efektif melalui pendekatan collaborative governance. Kerjasama antara pemerintah lokal dan komunitas adat memainkan peran penting dalam menjaga dan mempromosikan budaya tradisional ini. Karena hal ini sebelumnya menjadi suatu hal yang problematic dan harus diselesaikan oleh para pemangku kebijakan. Meskipun ada tantangan seperti perbedaan kepentingan dan keterbatasan sumber daya, sinergi positif yang dihasilkan dari kolaborasi yang efektif dapat mengatasi hambatan tersebut. Artikel ini juga merekomendasikan strategi peningkatan kualitas sumber daya manusia, pengembangan potensi budaya lokal, dan pemeliharaan nilai-nilai budaya Indonesia untuk memperkuat kerjasama antar pemangku kepentingan.

Dengan prinsip-prinsip partisipasi, akseptasi, komunikasi, kepercayaan, dan berbagi, pelestarian budaya nyawang bulan dapat dicapai dengan lebih inklusif dan berkelanjutan. Temuan ini memberikan wawasan penting bagi pengembangan kebijakan pelestarian budaya di wilayah adat lainnya, menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dengan harapan ada dukungan dan kolaborasi dengan pihak pemerintah.

Referensi

- C. Ansell, A. G. (2007). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal Of Public Administration Research and Theory*.
- Creswell, J. W. (2021). *Research Design (Pendekatan Metode Kualitatif)*
- Emily R. 2011. *Collaboration: A Literature Review*. Pearson.
- Gibson. 2002. *Organisasi Perilaku-strukturproses, Terjemahan, Edisi V*. Jakarta. Penerbit Erlangga.
- Koendjaraningrat, Pengantar Ilmu Antropologi, Sejarah Teori Antropologi, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.
- Retno sunu astuti, H. w. (2020). Collaborative Governance dalam persepektif Administrasi publik.
- Rosyida, Sri Yuliani, Gusty Putri. 2017. Kolaborasi dalam Perencanaan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kelurahan Semanggi Kota Surakarta. *Jurnal Wacana Publik* Vol 1 No 2, 2017 hlm 33-47
- Saenal, 2020, upaya melestarikan budaya Indonesia di era globalisasi, *jurnal dialektika sosial dan budaya*, Vol.1 No 1
- Sedyawati, Edi. 2006. *Budaya Indonesia: Kajian Arkeologi, Seni, dan Sejarah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada Soekanto,
- Soekanto.2002. *Teori Peranan*. Jakarta. Bumi Aksara
- Triwardani, Reny. Rochayanti, Christina. 2014. Implementasi kebijakan desa budaya dalam upaya pelestarian budaya lokal. *Jurnal Reformasi*, no2, vol 4. Universitas Tribhuana Tunggaladewi.
- Yunus. Rasid, 2014, *Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Sebagai Penguat Karakter Bangsa, Studi Empiris Tentang Hayula*, Yogyakarta, Budi Utama.